



Relokasi PKL Malioboro Dimulai Pekan Depan

DPRD Kota Yogya Bentuk Pansus Awasi Proses Penataan Pedagang

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah DIY memastikan bahwa proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di kawasan Malioboro dimulai pekan depan.

Hingga kini, sedikitnya 1.800 pedagang yang terdapat untuk menempati spot berjualan baru yakni di eks Kantor Dimas Pariwisata dan eks Bioskop Indra.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengungkapkan, saat ini PKL tengah menentukan skema penentuan lapak yang akan ditempati. Proses pembagian lapak tersebut diserahkan kepada masing-masing paguyuban pedagang.

"Iya (relokasi) jalan terus. Minggu depan mulai geser dengan cara undian atau bagaimana terserah mereka menatanya. Ya sekitar awal Februari (2022) sudah selesai semua, begitu," ungkap di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (18/1).

Aji mengatakan, relokasi dilakukan secara bertahap mengingat jumlah PKL yang dipindah mencapai ribuan. Dia pun meminta PKL untuk tidak mempersoalkan proyek relokasi tersebut.

Sejauh ini, Pemda DIY akan berupaya untuk menjamin kenyamanan para pedagang.

"Besok kan nggak usah ngeret-ngeret gerobak lagi. Sudah menetap, tidak keahunan, tidak usah masang tenda, dan ada tempat yang lebih legal," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah setempat juga akan menambah sejumlah fasilitas selain lapak-lapak PKL seperti toilet, *co-working space*, hingga tempat parkir untuk mendukung akses pengunjung.

Aji juga berjanji untuk selalu mendengarkan kebutuhan dan permintaan para pedagang yang terdampak relokasi. Permintaan itu bisa disampaikan melalui paguyuban-paguyuban yang mewakili PKL.

"Pemda akan berkolaborasi dengan Pemkot untuk memastikan relokasi tersebut tidak merugikan PKL," ujarnya.

Sementara itu, DPRD Kota Yogyakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang difokuskan untuk mengawasi jalannya kebijakan penataan para pedagang di kawasan premium tersebut.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiyoatmo, menyampaikan, Pansus tersebut memang diberikan tugas khusus untuk mengawasi proses relokasi. Ia tak menampik, sempat terjadi diskusi alot antar anggota, atau fraksi-fraksi di legislatif saat membahasnya. Senin (17/1) malam.

"Iya agak alot memang, karena teman-teman DPRD tidak menghendaki ada penggabungan nama Pansus. Sehingga, disepakati Pansusnya ini hanya untuk mengawasi relokasi pedagang Malioboro saja," jelasnya.

Danang menyampaikan, Pansus tersebut mendapat respons positif dari seluruh fraksi di DPRD Kota Yogyakarta. Benar saja, semua fraksi bersedia mengirimkan anggotanya ke Pansus, sehingga dipastikan memiliki kekuatan politik.

"Seluruh fraksi setuju dan mengirimkan anggotanya, ya. Pansus beranggotakan 12 orang dengan pimpinannya itu, Mas Fokki Ardianto (PDI Perjuangan) dan Mas Dwi Chandra Putra (Partai Nasional Demokrat)," ucap Danang.

Ia pun sudah menginstruksikan pimpinan Pansus, agar secepatnya bergerak menjadi penghubung atau mediator antara Pemkot Yogyakarta dengan PKL. Sehingga, mampu tercipta komunikasi yang lebih intens, serta tidak saling menyalahkan terkait relokasi dalam waktu dekat itu.

"Kami memang memandang ada beberapa hal yang tidak sesuai, makanya kami ingin mendapat kejelasan. Jadi, kami merasa harus bertanggung jawab, supaya tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini, tegasnya.

"Misal potensi penggelembungan data pedagang. Lalu, pengalihan hak, semestinya dapat tapi tidak dapat, terus yang tidak dapat malah dapat, atau munculnya pedagang-pedagang baru, itu harus diluruskan," lanjut Danang.

BERSIAP PINDAH

- Pemda DIY memastikan proses relokasi PKL Malioboro dimulai pekan depan.
- Hingga kini, sedikitnya 1.800 pedagang terdapat untuk menempati spot berjualan baru.
- Proses pembagian lapak tersebut diserahkan kepada paguyuban pedagang.
- DPRD Kota Yogyakarta membentuk Pansus yang mengawasi penataan PKL.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menyampaikan, sebisa mungkin kebijakan relokasi jangan dipaksakan, saat masih ada pihak-pihak yang belum satu suara. Sebab, baik Pemkot Yogyakarta, maupun kalangan pedagang, harus melihat bersama, betapa kompleksnya Malioboro.

Bukan musuh
 Lebih lanjut, Danang menegaskan, keberadaan Pansus ini jangan diartikan sebagai penolakan dan upaya perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, legislatif ingin proses relokasi berjalan lancar tanpa adanya gangguan, entah dari eksternal, atau internal pemerintahan.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti pun mengukuti tidak keberatan dengan respons legislatif yang merealisasikan Pansus soal pengawasan penataan PKL Malioboro tersebut.

Bahkan, ia menilai, Pansus bisa menyajikan kejelasan, terkait proses relokasi ini.
 "Kalau ada Pansus, ya lebih bagus. Sehingga akuntabilitas lebih jelas. Tentu, saya mendukung Pansus. Jadi, tidak masalah itu, dibikin saja Pansus," jelasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005